

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kewirausahaan politik merupakan konsep yang menggunakan kolaborasi, inovasi serta kreasi. Yang pelaksanaannya menumbuhkan kegiatan ekonomi. Dilihat dari hal itu, maka kewirausahaan politik di arahkan sebagai solusi pemberdayaan masyarakat guna memecahkan permasalahan sosial di masyarakat seperti contohnya yaitu kemiskinan. Dengan demikian, kewirausahaan politik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsep kewirausahaan politik di gagas oleh Bill Drayton, pendiri Ashoka Foundation, Dryton mengatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam kewirausahaan politik, yaitu (1) adanya inovasi sosial maupun politik yang memiliki potensi untuk mengubah sistem yang terdapat di masyarakat dan (2) adanya individu yang memiliki visi yang kuat, kreatif, memiliki semangat berwirausaha, dan beretika¹.

Kewirausahaan Politik memiliki unsur *alertness* (sensitivitas) dan *discovery* (inovasi) yang di miliki oleh seorang aktor kewirausahaan politik untuk meningkatkan kemanfaatan publik dimana hal ini tentunya bisa di jadikan sumber politik yang kuat bagi para aktor kewirausahaan politik. Agar mampu mempersiapkan sumber daya politik yang kuat guna menjadi tameng dalam memenangkan pilkada selanjutnya, maka penjelasan mendalam mengenai praktik kewirausahaan politik dilakukan dari beberapa peninjauan kinerja munculnya berbagai inovasi yang di lakukan .

¹ Mattew McCaffery. "Kewirausahaan Politik". Jurnal Scientific Research. 2011.

Kewirausahaan Politik memberikan contoh bahwa seorang penguasa daerah membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang nantinya dapat di jadikan sumber kekuatan politik sehingga kewirausahaan politik pengusaha memiliki program unggulan yang di kembangkan terus – menerus dengan harapan nanti ketika ada pemilihan umum atau daerah maka pengusaha mendapatkan keuntungan politik dari program keunggulannya yang sering di akolahkan sebagai bentuk inovasi. Selain pengusaha, maka masyarakat juga memperoleh keuntungan yaitu masyarakat mendapatkan pembaharuan pembangunan sehingga dapat menunjang maksimalnya prasarana dan prasarana yang di sediakan oleh pemerintah.

Inovasi merupakan sesuatu hal yang di lakukan dengan cara baru dengan memiliki ide yang kreatif. Selain kreatif, inovasi harus di tata semenyenangkan mungkin agar dapat menarik perhatian publik karena pada dasarnya pembentukan inovasi sering sekali di jadikan sebagai alat dalam meningkatkan eletabilitas dan akuntabilitas seorang pemimpin. Oleh karena itu pemimpin daerah akan terus – menerus menciptakan beragam inovasi kreatif dengan tujuan untuk mendapatkan ide dalam pembangunan selain itu inovasi yang kreatif dan menyenangkan masyarakat tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemimpin daerah.

Inovasi di lakukan dari pemerintahan pusat baik secara nasional maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya ada di batas pemerintahan kecil namun juga di tingkat terbesarnya seperti berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh pemimpin daerah yaitu Presiden. Presiden juga memiliki banyak macam inovasi pembangunan dan peningkatan yang memberikan bukti bahwa

inovasi sudah menjadi prioritas utama para pemimpin daerah untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan akuntabilitas pemimpin. Oleh karena itu peneliti melampirkan data inovasi tingkat nasional sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Inovasi Tingkat Nasional

Inovasi	Keterangan
Blusukan Jokowi	Cara presiden untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
Badan riset dan inovasi nasional	Pusat riset nasional yang dapat berdaya saing global dengan SDM unggul.
Adiwiyata Nasional	Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada sekolah – sekolah
Innovative Government Award	Penghargaan yang di buat atas keberhasilan inovasi di bidang peningkatan layanan public.

Sumber : Olahan Penulis

Data di atas merupakan beberapa contoh inovasi yang ada di tingkat Nasional dan dari data di atas maka dapat di simpulkan bahwa inovasi merupakan suatu alat yang dapat di jadikan alat sebagai bentuk pembangunan kreatif yang menyenangkan masyarakat sehingga menarik simpati masyarakat untuk memberikan dukungan yang baik dengan relevansi yang jelas.

Inovasi tidak hanya di lakukan di tingkat nasional maupun Provinsi namun juga pada Kabupaten dan Kota. Melihat keuntungan dan peluang dari suatu inovasi maka pemimpin yang peka berlomba – lomba menciptakan inovasi yang kreatif. Dalam hal ini, Kota Jambi tentunya tidak kalah dalam memberikan inovasi –

inovasi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Oleh karena itu peneliti menampilkan data nama – nama inovasi yang ada di Kota Jambi

Tabel 1.2 Data Inovasi Yang dibuat di Kota Jambi

Inovasi	Keterangan
Kampung Bantar	Di tujukan untuk penanganan mengenai permasalahan kebersihan,keamanan dan Pendidikan
iBangga	Ditujukan untuk mengukur kualitas keluarga melalui ketentraman,kemandirian yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga.
Smart city/Kota Pintar	Untuk menjadikan Kota Jambi menuju kota pintar dengan pelayanan terbaik dari pemerintah
Rumah Stunting	Tempat pertemuan orientasi dan sosialisasi stunting melalui bina keluarga balita (dilakukan setiap bulan)

Sumber : Olahan Penulis

Berawal dari Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial selain itu di sebutkan pada pembukaan Undang – Undang dasar pada alinea ke-4 bahwa untuk membentuk suatu pemerintah salah satunya dengan memajukan kesejahteraan umum. Kemudian di tanggapi oleh pemerintah daerah termasuk pemerintahan Kota Jambi yang kemudian

mengeluarkan peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2014 tentang perunjuk teknis penataan Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar).²

Selain terpacu pada tujuan negara, hal tersebut yang kemudian membawa pemerintahan kota jambi memunculkan program tersebut. Ketidakseimbangan kondisi sosial tepatnya pada masyarakat di pusat Kota dengan masyarakat yang bermukim di perbatasan Kabupaten atau Kota sehingga pembangunan gedung – gedung tidak merata, perbedaan yang terjadi kemudian memunculkan. Program Kampung Bantar sebab program ini di buat guna mempercepat pembangunan Kota Jambi serta meminimalisir ketimpangan pembangunan khususnya pada kelurahan maupun ke tingkat terendahnya yaitu RT (Rukun Tetangga). Kampung Bantar dibentuk dengan 3 indikator unggul dalam pelaksanaan program ini yakni bersih, aman dan pintar, selanjutnya faktor pemerintah mengemukakan program ini ialah karena banyak masyarakat yang bersikap abai dalam perihal kebersihan apalagi di sekitar tempat tinggalnya³.

Program Kampung Bantar ini merupakan program unggulan inisiatif pemimpin Kota Jambi serta sudah tercatat mendapat penghargaan *Top Inspiring e-Goverment Management System dan Indonesia Innovation Award 2019*. Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa program kampung bantar merupakan inovasi cerdas yang harus di apresiasi dan di upayakan implementasinya secara maksimal agar tujuan utama program ini dapat tercapai adapun tujuan utama dari program kampung bantar ini adalah untuk menjadikan suatu lingkungan perkampungan

²Fiqri Fadji, *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bantar di Kota Jambi* Skripsi, hlm 2-3

³*Ibid* hlm 4-5

terkecil di masyarakat yang berwawasan lingkungan yang sehat dan bersih. Bantar adalah kepanjangan dari Bersih, Aman dan Bersih yang merupakan indikator dari program ini. Indikator yang pertama yaitu Bersih yang di tujukan pada pengelolaan sampah yang baik seperti pengadaan bank sampah, lingkungan yang asri serta di tumbuh tanaman obat. Indikator kedua yaitu Aman guna memberikan keamanan yang maksimal maka untuk memenuhinya di perlukan pos kamling (Pos Keamanan Keliling) dimana warga di rancangan dapat bergiliran bertugas melakukan penjagaan pada kawasan kampung. Indikator terakhir yaitu Pintar yang di lakukan dengan cara membuat sudut baca perpustakaan di desa atau kelurahan kemudian di kelola oleh masyarakat setempat⁴.

Dalam mendorong Program Kampung Bantar tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) menjelaskan bahwa kampung bantar menjadi salah satu program yang memberdayakan masyarakat kecil yaitu seperti rukun tetangga untuk itu peran Camat, Lurah dan Ketua RT dirasa sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di kota jambi melalui inovasi kampung bantar⁵.

Program kampung Bantar di mulai pada tahun 2014, di awali dengan sosialisasi dari yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, yang melalui tahapan pendaftaran RT ke kelurahan kemudian kelurahan mendaftarkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat

⁴Ayu Dwitasari, *Pelaksanaan Program Kampung Bantar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi di Kecamatan Paal Merah* <https://repository.unja.ac.id/24318/>

⁵Website rri.co.id <https://www.rri.co.id/daerah/464837/pemkot-jambi-budaya-gotong-royong-wujudkan-kampung-bantardiakses> Tgl 5 Des 2023

Perempuan dan Perlindungan anak agar dapat mengikuti kampung bantar. Program kampung bantar memberikan apresiasi terhadap kampung yang mengikuti program kampung bantar apabila wilayah tersebut di katakan layak. Tiap tahunnya program ini di lombakan namun masih terdapat banyak Kelurahan atau RT yang tidak mengikutinya⁶. Maka itu peneliti menampilkan data yang sudah mengikuti kampung bantar dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Kecamatan Terdaftar Kampung BANTAR

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Kategori Kampung Bandar			
				Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
1.	Jambi Timur	9	192	38	35	14	87
2.	Telanaipura	6	132	34	23	14	71
3.	Danau Sipin	5	151	17	26	18	61
4.	Pelayangan	6	46	13	17	4	34
5.	Danau Teluk	5	44	9	17	7	33
6.	Pasar Jambi	4	58	5	13	15	33
7.	Kota Baru	5	188	47	19	15	81
8.	Alam Barajo	5	213	39	11	5	55
9.	Jelutung	7	233	15	45	16	76
10.	Jambi Selatan	5	150	21	38	13	72
11.	Paal Merah	5	240	55	35	17	107
Jumlah		62	1647	293	279	138	710

⁶Fiqri Fadjri, *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penilaian Kampung Bersih, Aman dan Pintar di Kota Jambi*<https://repository.unsri.ac.id/78851/>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (2021).

Berdasarkan tabel di atas maka peneliti akan memperlihatkan data wilayah yang tidak terdaftar program kampung bantar pada tahun 2021 dalam bentuk tabel dibawah ini

Tabel 1.4 Data Kecamatan Tidak Terdaftar Kampung BANTAR

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Kategori Kampung Bantar			
				Besar	Sedang	Kecil	Jumlah
1.	Jambi Timur	9	192	48	32	25	105
2.	Telanai Pura	6	132	10	39	12	61
3.	Danau Sipin	5	151	9	38	43	90
4.	Pelayangan	6	46	8	4	0	12
5.	Danau Teluk	5	44	1	10	0	11
6.	Pasar Jambi	4	58	0	2	23	25
7.	Kota Baru	5	188	60	34	13	107
8.	Alam Barajo	5	213	101	48	9	158
9.	Jelutung	7	233	9	75	73	157
10.	Jambi Selatan	5	150	34	28	16	78
11.	Paal Merah	5	240	80	41	12	133
Jumlah		62	1647	360	351	226	937

Sumber: Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (2021).

Berdasarkan data di atas kemudian di susun dalam bentuk tabel maka dapat di simpulkan bahwa banyak RT di tiap kecamatan yang belum mengikuti program kampung bantar. Maka penulis akan menyajikan data perbandingan program kampung bantar berdasarkan data tabel 1 dan data tabel 2 tersebut :

Tabel 1.5 Perbandingan Data 1 dan Data 2

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Data terdaftar kampung bantar (%)	Data tidak terdaftar kampung bantar (%)
1.	Jambi Timur	9	192	45,31	54,68
2.	Telanai Pura	6	132	53,59	46,21
3.	Danau Sipin	5	151	40,39	59,6
4.	Pelayangan	6	46	73,91	46,08
5.	Danau Teluk	5	44	75	25
6.	Pasar Jambi	4	58	56,89	43,1
7.	Kota Baru	5	188	43,08	56,91
8.	Alam Barajo	5	213	25,82	74,17
9.	Jelutung	7	233	32,61	67,38
10.	Jambi Selatan	5	150	48	52
11.	Paal Merah	5	240	44,58	55,41
Jumlah		62	1647	49,03	52,77

Sumber :Penulis, 2023

Berdasarkan olahan data pada tabel 1.3 maka dapat di lihat bahwa di Kota Jambi masih sangat tinggi yang tidak terdaftar program kampung bantar dengan peresentase 52,77%. Tinggi nya persentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah setempat atau kepala lurah masih gagal dalam mengsosialisasikan program ini sehingga masyarakat kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam menjalankan program Kampung Bantar tersebut. Tentu ini menjadi problematika dari program Kampung Bantar ini. Terlebih pada daerah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu pada Kecamatan Alam Barajo yang jika di lihat pada tabel 1.3 memiliki 74,17% data yang belum kampung bantar. Penilaian atau penentuan skor

program kampung bantar di tentukan dengan 3 indikator bentuk penilaian yaitu yang pertama jika dinilai berfungsi maka akan di berikan skor (2), ada namun tidak berfungsi maka akan diberikan skor (1), dan terakhir jika tidak ada maka skor nya adalah (0). Oleh karena itu maka penulis juga menampilkan total penilaian skor akhir yang ada di tiap kelurahan yang ada di kecamatan alam barajo sebagai berikut:

Tabel 1.6 Skor Penilaian di Kecamatan Alam Barajo

No	Kelurahan	Skor Penilaian			Jumlah
		Bersih	Aman	Pintar	
1.	Beliung	89	67	77	233
2.	Bagan Pete	64	47	34	145
3.	Kenali Besar	88	78	57	223
4.	Mayang Mengurai	79	86	66	231
5.	Rawa Sari	65	55	40	160

Sumber : Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (2021).

Jika dilihat pada tabel 1.4 dapat di simpulkan bahwa program kampung bantar yang ada di Kecamatan Alam Barajo tepatnya di Kelurahan Bagan Pete memiliki nilai skor terendah dari ke 4 kelurahan lainnya. Hal ini menunjukka adanya problematika program Kampung Bantar pada daerah tersebut sehingga menyebabkan tingginya persentase ketidak ikut-sertaan dalam program Kampung Bantar sedangkan adanya program ini berangkat dari masalah kebersihan, keamanan, dan Pendidikan oleh karena itu, guna untuk menyelesaikan masalah tersebut program ini juga mengakselerasi percepatan pembangunan antar wilayah⁷.

⁷ Pedoman Penilaian Kampung Bantar (Bersih, Aman, dan Pintar) Kota Jambi 2015

Setiap program tentunya akan mengalami permasalahan salah satunya seperti yang terjadi pada Program Kampung Bantar dimana program ini belum berjalan sepenuhnya di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo namun di daerah lain seperti Kelurahan Eka Jaya yang sudah 100% Kampung Bantar yang dapat menjadi bahan percontohan bahwa Kampung Bantar ini merupakan inovasi yang sukses menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat menarik perhatian sehingga dapat memberikan penilaian yang menjadi daya dorong berlangsungnya Program Kampung Bantar ini.

Dari penjelasan di atas maka Kelurahan Bagan Pete menjadi sesuatu yang tepat untuk di jadikan objek karena ketidak berlangsung Program Kampung Bantar dengan baik di daerah tersebut akan menjawab pandangan dalam memberikan penilaian apapun oleh karena itu perlu di lakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik kewirausahaan politik yang terjadi dengan pencontohan daerah yang telah berhasil menjadi Kampung Bantar.

Dengan keberhasilan Program Kampung Bantar di Kelurahan lain memberikan peningkatan elektabilitas dan akuntabilitas dari Walikota Jambi walaupun masih ada daerah yang belum sepenuhnya mencapai indikator sesuai dengan yang di tujukan dalam Program Kampung Bantar. Namun di sisi lain masyarakat yang tempatnya belum sepenuhnya Kampung Bantar justu tetap berpandangan yang baik karena Program Kampung Bantar di nilai sebagai inovasi yang menyenangkan masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kegiatan Praktik Kewirausahaan Politik karena adanya program ini terbukti dapat meningkatkan elektabilitas dan akuntabilitas pemimpin daerah.

Kewirausahaan politik juga dapat di sebut sebagai suatu usaha meniti karir politik dengan mencari popularitas dengan mengejar penciptaan kebijakan yang menyenangkan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan mengenai program kampung bantar ini tidak semata-merta hanya untuk pembangunan namun juga untuk memberikan nilai positif bagi masyarakat yang kemudian di manfaatkan dalam mendapatkan popularitas sehingga sedikit demi sedikit dengan berjalannya program ini maka aktor politiknya dapat mencapai tujuannya.

Hubungan Program Kampung Bantar dengan pendekatan pada praktik kewirausahaan politik yaitu dengan adanya Program Kampung Bantar yang dinilai berhasil memberikan inovasi kepada masyarakat dan berhasil menembus nasional sukses menaikkan elektabilitas dan akuntabilitas Walikota Jambi dalam masyarakat luas sehingga dengan meningkatnya elektabilitas dan akuntabilitas Walikota Jambi dapat memberikan sumber daya pertahanan politik sebagai persiapan dalam pemilihan daerah selanjutnya.

Pembahasan lanjut mengenai hal ini yaitu dengan adanya daerah lain yang berhasil 100% menjadi Kampung Bantar menunjukkan bahwa program ini layak di jadikan inovasi yang memberikan kemanfaatan publik bagi seluruh masyarakat dan oleh karena itu ketika di daerah yang belum berhasil menjadi Kampung Bantar seperti Kelurahan Eka Jaya penilaian masyarakat terhadap pemimpin daerah menjadi baik atau bahkan tidak merespon hal apapun.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Rikki Adi Rindi yang berjudul Kewirausahaan Politik Kepala Daerah (Studi Kasus Program Lelang Kinerja Pemerintah Kota Malang menjelaskan bahwa lelang kinerja di inisiasi langsung

oleh walikota di kota tersebut untuk membentuk perubahan baru dalam birokrasi Kota Malang hal tersebut di ungkapkan walikota dengan para perangkat daerah lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kota malang dalam forum lelang kinerja, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori institusionalisme baru⁸.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Yolanda wilda amelia yang berjudul Program Mobil Siaga Desa Sebagai Bentuk Politik Pertahanan di Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa program mobil siaga merupakan upaya strategi politik dalam bidang kesehatan. Program ini di rancang agar masyarakat mau dan mampu hidup sehat. Tujuan yaitu untuk mengetahui program mobil siaga sebagai strategi politik. penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini adalah program mobil siaga desa selain untuk menyediakan kebutuhan kesehatan juga memiliki tujuan secara politik untuk menjaga citra baik di masyarakat.⁹.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Juliansyah Zulham Adimasurya yang berjudul Praktik Kewirausahaan Politik Kepala Desa (Studi Kasus Program “Lima Divisi Menuju Lingkungan Berkualitas” di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menjelaskan bahwa praktik kewirausahaan politik dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kemanfaatan publik. Dan aktor utama dalam berjalannya praktik kewirausahaan politik ini harus peka terhadap peluang dari luar yang berpotensi dalam pembangunan daerah dengan

⁸ Rikky Adi Rindi, *Kewirausahaan Politik Kepala Daerah (Studi Kasus Program Lelang Kinerja Pemerintah Kota Malang)*, Skripsi, 2019.

⁹ Yolanda Wilda Amelia, *Program Mobil Siaga Desa Sebagai Bentuk Politik Pertahanan di Kabupaten Jombang*. 2016 Universitas Brawijaya

memaksimalkan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menonjolkan nilai jual dari kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menunjukkan 8 hasil penelitian yaitu : kebijakan bermodalkan elit, manfaat peluang, kebijakan yang di hasilkan, faktor penyebab 5 divisi, respon masyarakat, praktik kewirausahaan yang di lakukan kepala desa karanganyer, dampak bagi pemerintahan, dan dampak bagi masyarakat.¹⁰

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yaitu substansial yang merujuk pada partisipasi publik pada Program Kampung Bantar. Dengan begitu Program Kampung Bantar melibatkan partisipasi masyarakat dan program ini menciptakan pemikiran inovatif dan intelegensi publik sehingga dalam hal ini partisipasi publik yang harus di perhatikan selain itu praktik kewirausahaan politik yang menjadi sasaran dalam penelitian terbaru yaitu bagaimana Program Kampung Bantar dapat menjadi alat dalam mempertahankan sumber daya politik untuk dapat menghadapi pilkada selanjutnya.

Program Kampung Bantar belum banyak di teliti terlebih dalam aspek kewirausahaan politik maka peneliti yang di lakukan penulis yaitu melakukan penelitian terhadap praktik kewirausahaan politik dalam program kampung bantar yang berfokus di Kecamatan Alam Barajo. Berdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“Praktik Kewirausahaan Politik (Studi Terhadap Program Kampung Bantar di Kelurahan Bagan Pete**

¹⁰ Juliansyah Zulham Adimasurya, *Praktik Kewirausahaan Politik Kepala Desa (Studi Kasus Program “Lima Divisi Menuju Lingkungan Berkualitas” di Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)* <https://repostory.ub.ac.id>

Kecamatan Alam Barajo)” yang di inginkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai Praktik Kewirausahaan Politik dengan menempuh analisi secara meluas sehingga penelitian program kampung bantar dalam konsep kewirausahaan politik dapat jabarkan dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan kembali masalah yang akan di kaji, sehingga penyelesaian masalah bias di tentukan dengan tepat dan mendapat tujuan dari penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas maka, permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu apakah praktik kewirausahaan politik dalam Program Kampung Bantar di Kelurahan Bagan Pete Kecaamatan Alam Barajo dapat di jadikan sebagai alat dalam mempertahankan jabatan publik.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diterapkan untuk target yang diinginkan tercapai sehingga, dapat memberikan manfaat seperti yang di harapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik kewirausahaan politik yang di lakukan melalui studi terhadap Program Kampung Bantar di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di lakukan agar nanti nya di harapkan dapat memberi umpan balik atau manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini bermafaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa digunakan menjadi sumber pengetahuan maka referensi mengenai kewirausahaan politik dalam Program Kampung Bantar bisa menjadi acuan buat daerah lain lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan berhasil menjadi acuan dalam menyajikan masukan dan informasi bagi pihak – pihak yang terlibat khususnya pemerintahan daerah untuk memberi pemahaman lebih baik. Sehubungan dengan terhadap Praktik Kewirausahaan Politik dalam Program Kampung Bantar.

1.5 Landasan Teori

Teori merupakan landasan bagi penulis dalam menganalisa fakta yang terdapat di lapangan. Beberapa pendapat para ahli yang akan digunakan dalam pedeskripsian indikator dan mengidentifikasi fakta lapangan, menjadi media bagi peneliti dalam pemecahan fakta – fakta di lapangan. Berikut teori yang akan di gunakan peneliti, yaitu :

1.5.1 Teori Kewirausahaan Politik

Penjelasan paradigma lama *Institutionalism* menuju *New Institutionalism* memberi tempat bagi kewirausahaan politik untuk muncul. Paradigma *New Institutionalism* meyakini bahwa interaksi antar elemen melebihi batas – batas struktual pemerintahan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini di kenal sebagai *Networked governance* yang berlandakan pada :

“Interfirm cooperation in contrast to bureauctic structures within firms and formal conctractual relationship between them”

Yang memiliki arti sebagai penggabungan kerjasama sehingga berlawanan dengan susunan birokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kerjasama kontrak yang formal. Lalu proses perumusan kebijakan tidak bisa di lakukan secara *Unilateral* yang berdasarkan keinginan publik¹¹. Secara umum *Networked governance* juga mengkehendaki adanya pemberdayaan berkelanjutan dengan meningkatkan nilai publik hal ini diindikasikan dengan partisipasi *Civil Society* dalam proses politik. Partisipasi dari *Civil Society* memacu kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang bersifat inovatif, kemudian menurut Jean Hartley suatu inovasi harus memiliki durabilitas dan dampak yang signifikan terhadap sebuah organisasi dan ciri khasnya. Dalam konteks kewirausahaan politik inovasi adalah hal yang di tekankan untuk menyikapi konteks zaman yang terus berubah¹².

Teori kewirausahaan politik terbentuk dari pengembangan teori kewirausahaan ekonomi (Pasar) menuju ranah politik. Teori kewirausahaan politik ini mengacu pada pemimpin kreatif yang memiliki akal untuk mempraktikkan keterampilan politik untuk menciptakan kebijakan yang baru dengan kata lain kewirausahaan politik adalah kemampuan elit untuk memberikan inovasi politik dalam masyarakat. Praktik kewirausahaan politik juga di definisikan sebagai bentuk sumber daya yang di peroleh dengan paksa oleh negara di pasar yang bisa di identifikasi, berdasarkan definisi ini maka dapat di simpulkan bahwa kewirausahaan politik di hasilkan dari proses kompetisi publik sehingga

¹¹Candace Jones;Hestely,William S;Borgatti,Stephen P.1997. *A general theory of network governance: exchange conditions and social mechanisms*. Boston : Academy of management. 22(4)911-945. hlm 920

¹² Jean Hartley.2011 "*Innovation in governance and public services: past and present*" London : public money and management 25,1 : 27. hlm 553

mendapatkan jabatan publik. Kewirausahaan politik juga di dorong oleh peluang yang di temukan secara politisi dengan mempertahankan sumber daya politik dan hubungan patronage serta melihat intensif yang di peroleh dari kewirausahaan politik sehingga dapat menjadi daya dorong tindakan selanjutnya¹³.

Dalam studi tentang teori kewirausahaan politik maka Mc Caffery dan Sallerno mengemukakan bahwa ada tiga arus besar pemikiran. Yang pertama Politisi *rent-seeking*, kedua elemen *entrepreneurship*, ketiga, konsep Neo-Institusionalisme. Hal inilah kemudian yang di lakukan para aktor politik membuat kebijakan bersifat strategis, karena berusaha mengoptimalkan potensi yang ada.

Spesifiknya, Geoffrey G. Meredith *et al* (2002:-5-6) memberikan daftar ciri – ciri dan watak seorang wirausahawan yang di paparkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Ciri – ciri dan Watak Wirausahawan Politik

Ciri – ciri	Watak
Percaya Diri	Keyakinan, ketidaktergantungan, individualis, optimis.
Berorientasi pada tugas dan hasil	Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan, ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, dan inisiatif.
Pengambilan Risiko	Kemampuan mengambil risiko, suka pada tantangan.
Kepemimpinan	Bertingkah laku sebagai pemimpin, mudah bergaul, menanggapi saran dan kritik.
Keorisinilan	Inovatif dan kreatif, fleksibel, pengetahuan yang banyak.
Orientasi masa depan	Pandangan jauh ke depan

Sumber : Geoffrey G.Meredith *et al*, 2002 : 5-6

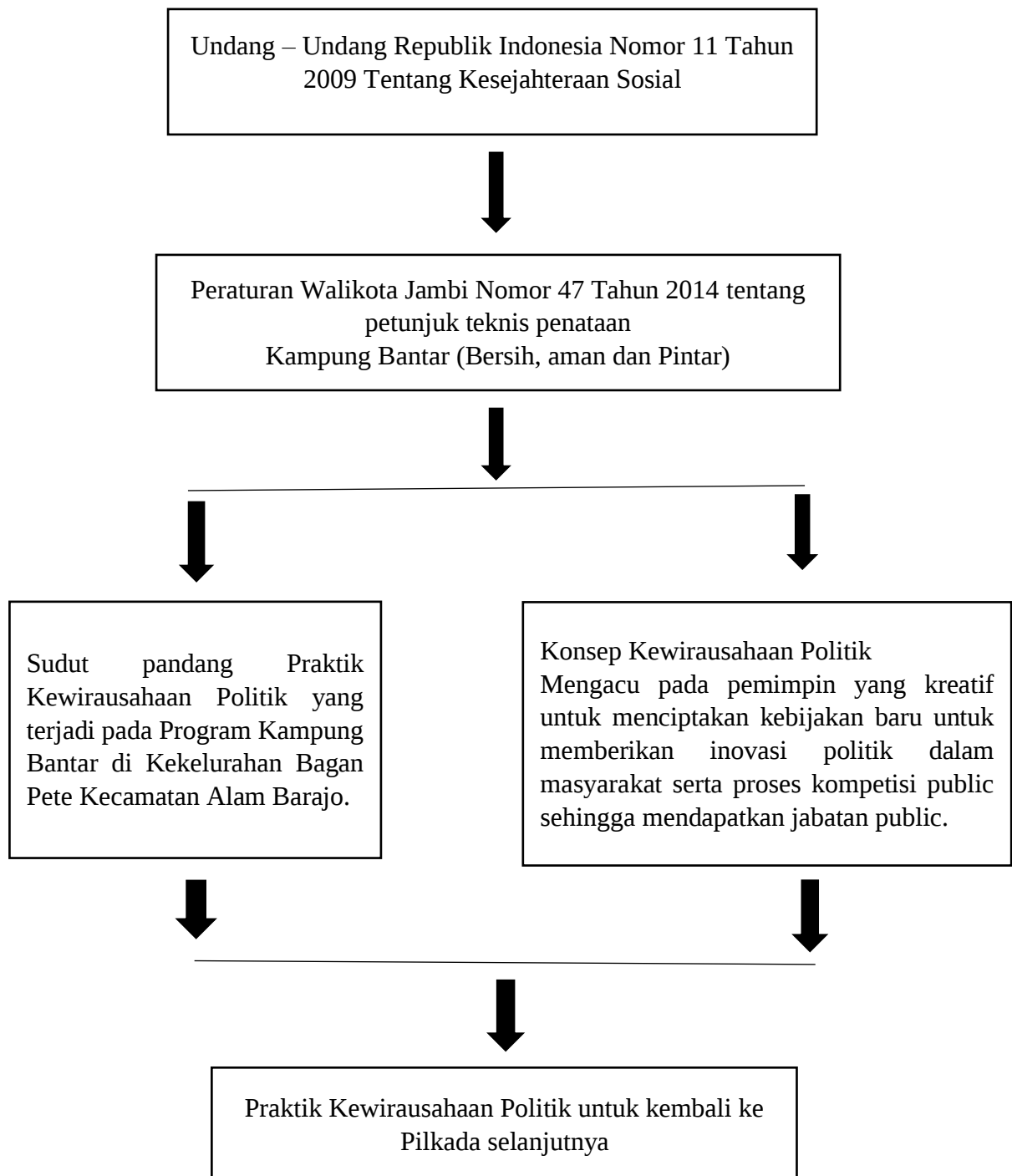
¹³ Laili Baririoh, M.Anas Fakhruddin “*Political entrepreneurship di madura (Studi tentang kuasa aktor dalam demokratisasi lokal)* Jurnal Review Publik. Vol 11.No 02.Des 2021 hlm 138-139.

Dari penjelasan ciri – ciri dan watak di atas maka dapat di simpulkan inti dari karakteristik seorang wirausahawan politik adalah kreatifitas maka dari situ sangat di perlukan aktor kewirausahaan politik yang memiliki sifat kreatifas guna mencapai kebijakan baru yang baik¹⁴. Selain memiliki kreatifitas wirausahawan politik harus memanfaatkan peluang keuntungan dalam ranah politik yang dibagi menjadi dua yaitu keuntungan produktif yang melakukan alokasi daya secara efisien dan aktor kewirausahawan politik menggunakan cara ekonomi dalam memperoleh keuntungan sedangkan keuntungan predatory disebabkan oleh alokasi sumber daya dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Dari penjelasan ini tentunya lebih menguatkan bahwa kebijakan yang di peroleh dari kewirausahaan politik elit, urgensi dari pembahasan jenis kebijakan elit dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Kewirausahaan Politik dalam Program Kampung Bantar karena pada pengimplementasian sangat terbilang kurang¹⁵.

¹⁴ *Ibid* hlm 141-140

¹⁵ *Ibid* hlm 17-22

1.6 Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam merancang dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian ini, di perlukan suatu panduan berupa kerangka pikir yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan yang sedang di teliti, seperti kerangka pikir yang telah di tampilkan di atas.

Pada penelitian ini dirujuk dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial kemudian Walikota menerbitkan peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis penataan Kampung Bantar. Berdasarkan rujukan tersebut maka penelitian ini mengarah pada praktik kewirausahaan politik yang di dapat dari Program Kampung Bantar guna mendapatkan sumber daya politik untuk maju pada pilkada selanjutnya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan Konsep Praktik Kewirausahaan Politik Program Kampung Bantar di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang khas meneliti permasalahan sosial dan kemanusiaan. Peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada elemen manusia, objek dan institusi serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku dan fenomena¹⁶.

¹⁶ Website UMSU <https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif> diakses 15 desember 2023

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang sangat tepat dalam melakukan penelitian. Penentuan lokasi yang tepat sangat diperlukan guna mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Agar peneliti dapat memahami penelitian yang dilakukan dan dapat mencapai tujuan penelitian yang telah disusun, maka penelitian ini berfokus dengan melihat bagaimana Praktik Kewirausahaan Politik Terhadap Program Kampung Bantar di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi secara faktual. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan informan yang menguasai dan memahami mengenai kewirausahaan politik¹⁷.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pendukung penelitian dalam memudahkan penelitian. Data sekunder bersumber dari buku-buku jurnal atau skripsi dan penelitian – penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Pada

¹⁷ *Ibid.*

penelitian ini data sekunder yang di gunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, dan data pendukung lainnya¹⁸.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* atau memilih individu dan tempat yang di teliti karena dalam teknik ini menggambarkan secara spesifik pemahaman tentang permasalahan riset dan fenomena¹⁹.

Tabel 1.8 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. H. Syarif Fasha, S.E.,M.E	Walikota Jambi Periode 2018-2023	Inisiator Program Kampung Bantar
2.	Iper Riyansuni, S.Th.I M.Kom	Kepala Camat Alam Barajo	Pemerintah setempat yang menjadi pelaksana
3.	Faisal Iskandar	Kepala Lurah Bagan Pete	Pemerintah Lurah yang mengatur berjalannya Program Kampung Bantar di Kelurahan dan Desa
4.	Iqbal Getara	Pemuda Desa	Sebagai Pemuda yang turut andil dalam proses Program Kampung Bantar
5.	Budiono	Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat yang di nilai dapat

¹⁸ *Ibid. hlm 418*

¹⁹ *Ibid. hlm 419*

			menjadi penasehat di dalam masyarakat.
6.	Parulian Saragih	Organisasi Pemuda Batak Bersatu	Sebagai organisasi yang memberikan dukungan dalam berjalannya Program Kampung Bantar
7.	Imron Muhammad	Penanggung Jawab Program	Orang bertanggung Jawab atau sebagai Kordinator dari Kecamatan ke Kelurahan.
8.	Ruslan	Masyarakat Setempat	Masyarakat Sejahtera
9.	Sri Nurasih	Masyarakat Setempat	Masyarakat prasejahtera
10.	Eka Putri	Masyarakat Setempat	Masyarakat prasejahtera

Sumber : Olahan Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan 2 tahap yaitu ²⁰:

a. Wawancara

Memperoleh data dengan cara peneliti menanyakan beberapa butir pertanyaan yang telah di susun kepada responden secara langsung yang bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang di sesuai dengan penelitian²¹

²⁰ *Ibid hlm 1*

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosda 2011), *hlm 67*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pemerolehan data atau informasi berupa buku, arsip/dokumen, artikel ilmiah, naskah, gambar, dan lain sebagainya sebagai laporan yang di sertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian dan menunjang penelitian yang sedang di lakukan dan tentunya dapat membantu mendukung argumen – argumen peneliti²².

1.7.7 Teknik Analisi Data

Teknik analisi data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi ²³:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, karna data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, maka data di sajikan dalam bentuk narsi deskriptif. Kemudian setelah data secara rinci di sajikan selanjutnya data tersebut di bahas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat di bahas.

²² Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 199

²³ *Ibid*, hlm. 420

1.7.8 Keabsahan Data

Trigulasi merupakan suatu pendekatan yang menggunakan beragam sumber, metode, penelitian dan teori agar dapat menyediakan bukti pendukung yang di gunakan untuk validasi dari sumber yang beragam. Trigulasi dengan sumber yang dilakukan pengecekan data berupa proses wawancara berulang – ulang dengan mengajukan pertanyaan dan melampirkan dokumentasi. Teknik trigulasi data dalam penelitian kualitatif dibagi berdasarkan data yang di periksa, adapun teknik trigulasi data yaitu :

1. Trigulasi sumber (Data Trigulation), yang berarti menggunakan berbagai sumber data dalam penelitian.
2. Trigulasi Penelitian (Investigator Trigulation), yang berarti menggunakan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian.
3. Trigulasi metodologis (Methodologi Trigulation), yang berarti menggunakan sejumlah perspektif metodologis dalam suatu penelitian.